

DAFTAR PUSTAKA

- Aljufri Bokingo. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. *Jurnal Katalogis*, 5(12), 43–54.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (n.d.). *Mengenal Sistem Kekayaan Negara*. Diakses tanggal 10 April 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/artikel/2014/06/mengenal-siman-sistem-informasi-manajemen-aset-negara>
- Febriana, E. N., Jayus, J., & Indrayati, R. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i2.4782>
- Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223.
- Tim Penyusun HKN. (2011). *Bahan Ajar Hukum Keuangan Negara*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012, tentang *Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang *Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Surat Edaran Nomor K26-30/V 71-2/99 Badan Kepegawaian Nasional tanggal 23 Mei 2019, tentang *Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan terkait Hari Raya Keagamaan*